

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS): antara Harapan dan Realita di SMA Negeri 3 Atinggola

Rosna Modelu^{*1}, Siti Asiah T.²

¹Mahasiswa Magister Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo,

²Prodi Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo

e-mail: ¹rosnamodelu@gmail.com, ²asiahpido@iain.gorontalo.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS), yang difokuskan pada faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya di SMA Negeri 3 Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologis. Data diperoleh dari hasil observasi, hasil tes, hasil wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendukung pelaksanaan program MPMBS yaitu: memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, adanya lingkungan sekolah yang aman, tertib dan kondusif, peran serta orangtua/wali siswa dalam mendukung pendidikan anaknya dan adanya peran komite sekolah dalam memberikan dukungan kepada sekolah. Sementara faktor penghambatnya antara lain: sarana dan prasarana yang belum lengkap, pendanaan yang minim, masih rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib madrasah, belum dipahami konsep dan tujuan program tersebut secara baik warga sekolah dan pihak yang berkepentingan serta peran masyarakat dalam membantu program sekolah belum maksimal. Kiranya kebijakan program MPMBS ini didukung dengan dana, dalam rangka mendorong sekolah untuk meningkatkan mutu atau prestasi siswa baik di bidang akademik maupun non-akademik. Selain itu, perlu meningkatkan kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama dukungan moral dan finansial yaitu keterlibatan yang diperlukan adalah intensitas dan eksistensinya dalam melaksanakan fungsi pendidikan.

Kata kunci: Manajemen, Mutu Pendidikan, Sekolah

Pendahuluan

MPMBS adalah model manajemen yang memberikan otonomi lebih luas pada sekolah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif, melibatkan secara langsung semua warga sekolah untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional. Ada beberapa asumsi dasar mengapa MPMBS diterapkan sebagai upaya dalam meningkatkan pengelolaan dan peningkatan mutu pendidikan. Pertama, yaitu sekolah dipandang sebagai suatu lembaga layanan jasa pendidikan yang memposisikan kepala sekolah sebagai manajer pendidikan. Kepala sekolah dituntut untuk bertanggung jawab atas seluruh komponen sekolah, dan harus berupaya meningkatkan mutu pelayanan dan mutu hasil belajar yang berorientasi kepada pemakai, baik internal (peserta didik), maupun eksternal (masyarakat), pemerintah, maupun lembaga industri dan dunia kerja. Kedua, yaitu MBS dapat efektif penerapannya jika didukung oleh sistem berbagi kekuasaan (power sharing) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten /kota) dalam pengelolaan sekolah. Ketiga yaitu sekolah paling mengetahui kekuatan, kelemahan,

peluang dan ancaman bagi dirinya, sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya.¹

MPMBS merupakan konsep pengelolaan sekolah yang ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan di era desentralisasi pendidikan. Sebagaimana dikemukakan juga oleh Irianto, bahwa implementasi Manajemen Berbasis Sekolah memberikan kesempatan yang luas bagi *stakeholders* untuk turut serta atau berpartisipasi aktif dalam menentukan arah sekolah.² MPMBS adalah sebagai model pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang lebih besar kepada sekolah), memberikan keluwesan kepada sekolah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga sekolah (guru, peserta didik, kepala sekolah, staf) dan masyarakat (orang tua peserta didik, tokoh masyarakat, ilmuwan, pengusaha), dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.³ Pelaksanaan MPMBS adalah sebuah proses formal yang melibatkan kepala sekolah, guru, orang tua, peserta didik dan masyarakat yang berada dekat dengan sekolah dalam proses pengambilan keputusan.⁴ Menurut Husni penerapan prinsip-prinsip MPMBS adalah pelimpahan tanggungjawab pada sekolah dalam mengelola seluruh sumber daya yang ada dengan prinsip kemandirian, keadilan, kemitraan, keterbukaan, efisiensi dan akuntabilitas dengan memposisikan peran sekolah dalam pengambilan keputusan secara partisipatif untuk mencapai tujuan pendidikan.⁵

Penerapan MPMBS memiliki tiga tujuan, yaitu: *Pertama*, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam aspek MPMBS untuk meningkatkan mutu sekolah. *Kedua*, mengembangkan kemampuan kepala sekolah bersama guru dan unsur komite sekolah dalam pelaksanaan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat setempat. *Ketiga*, mengembangkan peran serta masyarakat yang lebih aktif dalam masalah umum persekolahan dari unsur komite sekolah untuk membantu peningkatan mutu pendidikan.⁶

Keberhasilan penerapan MPMBS tersebut sangat tergantung pada kemampuan kepala sekolah untuk dapat berperan secara aktif dalam pengelolaan sekolah dengan memberdayakan semua komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan sekolah, khususnya dalam memberdayakan masyarakat secara keseluruhan. Namun dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Untuk itu, penelitian ini mengkaji, mendalami konsep dan hal ihwal yang mengkait dengan faktor

¹Ermis Sola, *Penguatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Melalui Implementasi Kurikulum 2013*, (Jurnal Idaarah, Vol. I, No. 1, Juni 2017), h. 1-13.

²Irianto, Yoyon Bahtiar, *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), h. 159

³Rohiat. *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik*. (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 47

⁴Dede, Rosyada, *Paradigma Pendidikan Demokratis*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 267

⁵Husni, Karna. *Manajemen Perubahan Sekolah*. (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 2-3

⁶Umiarso., & Gojali Imam. *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), h.80

pendukung dan pelaksanaan program MPMBS terutama di pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola.

Konsep MPMBS

MPMBS secara leksikal berasal dari tiga kata, yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. *Manajemen* adalah proses menggunakan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran. *Berbasis* memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. *Sekolah* merupakan lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan memberikan pelajaran. Berdasarkan makna leksikal tersebut maka manajemen berbasis sekolah dapat diartikan penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.⁷

Danim secara sederhana mendefinisikan MPMBS sebagai desentralisasi kewenangan pembuatan keputusan pada tingkat sekolah. Pembuatan keputusan merupakan inti dari keseluruhan proses dan substansi tugas manajemen sekolah. Definisi ini memberikan penjelasan bahwa melalui MPMBS, pihak sekolah dan para *stakeholder* mempunyai wewenang untuk membuat keputusan sesuai dengan system pendidikan nasional. Keputusan yang diambil menyangkut seluruh aspek yang berhubungan dengan setiap pelaksanaan pendidikan di lingkungan sekolah berdasarkan peraturan yang berlaku.⁸ Sedangkan Ibtisam mengemukakan bahwa MPMBS secara konseptual digambarkan sebagai suatu perubahan formal struktur penyelenggaraan, sebagai suatu bentuk desentralisasi yang mengidentifikasi sekolah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan, serta bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana penting yang dengannya peningkatan dapat didorong dan ditopang.⁹

Sekolah berada pada bagian terdepan dari proses pendidikan, sehingga menjadi bagian utama dalam proses pembuatan keputusan untuk peningkatan mutu pendidikan, masyarakat dituntut partisipasinya agar lebih memahami, membantu, dan mengontrol proses pendidikan. Sedangkan pemerintah berperan sebagai peletak kerangka dasar kebijakan pendidikan serta menjadi fasilitator yang akan mendukung secara kondusif tercapainya peningkatan kualitas pendidikan di sekolah.¹⁰ Hal yang sama juga dikemukakan Miarso bahwa MPMBS sebagai pelimpahan wewenang pada sekolah untuk mengambil keputusan mengenai alokasi dan pemanfaatan sumber-sumber berdasarkan aturan akuntabilitas yang berkaitan dengan sumber tersebut. Dengan demikian, pihak sekolah tidak hanya bertanggungjawab kepada pimpinan yang lebih tinggi atau instansi pemerintahan tetapi juga kepada *stakeholder*.¹¹

⁷Nurkolis, *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi* (Jakarta : Grasindo, 2010), h. 1. Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18.

⁸Danim, Sudarmawan. *Konsep dan Teori Manajemen Berbasis Sekolah*. (Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2012), h. 22.

⁹Ibtisam Abu Dhou, *School-Based Management*. (Jakarta: Logos, 2012), h. 16

¹⁰Amiruddin Siahaan dkk, *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah* (Jakarta: Quantum teaching, 2006), h. 32

¹¹Miarso, Yusuf Hadi. *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. (Jakarta: Kencana, 2014), h. 728

MPMBS adalah model pengelolaan sekolah berdasarkan kekhasan, kebolehan, kemampuan, dan kebutuhan sekolah, yang dilakukan secara partisipatif, transparan, akuntabel, berwawasan ke depan, tegas dalam penegakan hukum, adil, egaliter, prediktif, peka terhadap aspirasi *stakeholder*, pasti dalam jaminan mutu, professional, efisien dan efektif dalam rangka peningkatan mutu.¹²

Secara konseptual, MPMBS dipahami sebagai salah satu alternatif pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang terdesentralisasi dengan menempatkan sekolah sebagai unit utama peningkatan mutu pendidikan. Menurut Aedi konsep ini memberikan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan sebagai unsur paling mendasar untuk meningkatkan mutu hasil pendidikan. Di pihak lain, MPMBS merupakan cara untuk meningkatkan motivasi kepala sekolah agar lebih bertanggung jawab terhadap mutu peserta didik. Untuk itu, sudah selayaknya kepala sekolah mengembangkan program-program kependidikan secara menyeluruh dalam melayani segala kebutuhan peserta didik di sekolah. Seluruh warga sekolah seyogyanya menyambut hal ini dengan merumuskan program sekolah yang lebih prioritas dan operasional sebab merekalah yang paling mengetahui akan kebutuhan peserta didiknya dan yang terbaik bagi peserta didiknya. Inilah filosofis MPMBS paling mendasar.¹³

Berbagai pendapat di atas, menunjukkan bahwa MPMBS adalah segala usaha untuk memberikan kewenangan kepada sekolah dan guru untuk mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggung jawabkan, mengatur serta memimpin sumber daya insani serta sarana dan prasarana untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah. MPMBS adalah program pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya, yang dilaksanakan secara mandiri oleh sekolah dengan melibatkan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah (*stakeholder*) secara langsung dalam proses pengambilan keputusan, untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam kerangka kebijakan nasional. Dalam hal ini berarti sekolah memiliki kewenangan lebih besar daripada sebelumnya, untuk mengelola sekolahnya dan pengambilan keputusan partisipatif merupakan esensi dari MPMBS.

Prinsip dan Tujuan MPMBS

Prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) adalah sebagai berikut. (a) Pendidikan yang efektif melibatkan semua pihak dalam mendidik anak; (b) Sekolah adalah unit terpenting bagi pendidikan yang efektif; (c) Segala keputusan sekolah dibuat oleh pihak-pihak yang benar-benar mengerti tentang sekolah termasuk seluruh warganya; (d) Guru-guru harus membantu dalam pembuatan keputusan program pendidikan dan kurikulum; (e) Sekolah mandiri membuat keputusan

¹²Slamet, PH. *Manajemen Berbasis Sekolah: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Income Generating Activity*. (Jakarta: Buletin Pelangi Pendidikan, 2016), h. 34

¹³Aedi, Nur. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*; Buku 1 Konsep Dasar. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, 2010), h. 15

pengalokasian dana, dan (f) Perubahan akan bertahan lebih lama apabila melibatkan *stakeholder*.¹⁴

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, MPMBS bertujuan: a) meningkatkan mutu pendidikan melalui pemberian wewenang dalam menata sekolah; b) meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam pengelolaan sekolah; c) meningkatkan tanggung jawab sekolah dalam penyelenggaraan pendidikan; d) meningkatkan kompetensi dalam bersaing antar sekolah.

Aedi mengemukakan secara umum MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumberdaya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Sedangkan secara khusus MPMBS bertujuan untuk meningkatkan: (a) kinerja sekolah (mutu, relevansi, pemerataan, efisiensi, efektivitas, inovasi, produktivitas sekolah) melalui kemandirian dan inisiatif sekolah, (b) transformasi proses belajar mengajar secara optimal, (c) meningkatkan motivasi kepala sekolah untuk lebih bertanggung jawab terhadap mutu peserta didik, (d) tanggung jawab sekolah kepada *stakeholders*, (e) tanggung jawab baru bagi pelaku MPMBS, (f) kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, (g) kompetensi sehat antar sekolah, (h) efisiensi dan efektivitas sekolah, (i) usaha mendesentralisasi manajemen pendidikan, dan (j) pemberdayaan sarana dan prasarana sekolah yang ada sesuai kebutuhan peserta didik.¹⁵

Secara operasional MPMBS merupakan “Keseluruhan proses pendayagunaan berbagai komponen pendidikan dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang diupayakan sendiri oleh kepala sekolah bersama semua pihak yang terkait atau berkepentingan dengan mutu pendidikan. Komponen dalam pengertian ini mencakup kurikulum dan pembelajaran, kesiswaan, kepegawaian, sarana prasarana, dan keuangan secara mandiri. Artinya, dikelola sendiri (*selfmanaging*), dirancang sendiri (*self-designing/self-planning*), diorganisir sendiri (*selforganizing*), diarahkan sendiri (*self-directing*), dan dikontrol/dievaluasi sendiri (*selfcontrolling/evaluating*) oleh semua pihak terkait.¹⁶

Mencermati tujuan MPMBS di atas, maka secara garis besar dapat dikatakan bahwa MPMBS bertujuan untuk memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan, keluwesan, dan sumber daya untuk meningkatkan mutu sekolah dengan kemandiriannya, karena itu maka: a) sekolah sebagai lembaga pendidikan lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya dibandingkan dengan lembaga-lembaga lainnya, sehingga ia bisa mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk memajukan lembaganya; b) sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya *input* pendidikan yang akan dikembangkan dan diberdayakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik; c) sekolah dapat bertanggungjawab tentang mutu pendidikan masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik, dan masyarakat pada

¹⁴ Aedi, Nur. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*., h. 11

¹⁵ Aedi, Nur. *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*., h. 5

¹⁶ Bafadal, Ibrahim. *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 84.

umumnya, sehingga ia akan berupaya semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan mencapai sasaran mutu pendidikan yang telah direncanakan; d) sekolah dapat melakukan persaingan sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovasi dengan didukung orang tua peserta didik, masyarakat dan pemerintah daerah setempat.

Karakteristik MPMBS

MPMBS memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh sekolah yang akan menerapkannya. Dengan kata lain, jika sekolah ingin sukses dalam menerapkan MPMBS, maka jumlah karakteristik MPMBS perlu dimiliki. Karakteristik MPMBS tidak dapat dipisahkan dengan karakteristik sekolah efektif. Jika MPMBS merupakan wadah/kerangkanya, maka sekolah efektif merupakan isinya. Karakteristik MPMBS dapat dilihat pula melalui pendidikan sistem. Karakteristik MBS bisa diketahui juga antara lain dari bagaimana sekolah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi sekolah, proses belajar mengajar, pengelolaan sumber daya manusia, dan pengelolaan sumber daya administrasi. Hal ini didasari oleh pengertian bahwa sekolah merupakan sebuah sistem, sehingga penguraian karakteristik MPMBS berdasarkan pada input, proses dan output.¹⁷

- a. Input Pendidikan. Dalam input pendidikan ini meliputi; (1) memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas, (2) sumber daya yang tersedia dan siap, (3) staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, (4) memiliki harapan prestasi yang tinggi, (5) fokus pada pelanggan.
- b. Proses. Dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu; (1) PBM yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi, (2) Kepemimpinan sekolah yang kuat, (3) Lingkungan sekolah yang aman dan tertib, (4) Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, (5) Sekolah memiliki budaya mutu, (6) Sekolah memiliki *team work* yang kompak, cerdas, dan dinamis.
- c. Output yang diharapkan. Output Sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya output dapat di klasifikasikan menjadi dua yaitu output berupa prestasi akademik yang berupa NEM, lomba karya ilmiah remaja, caracara berfikir (Kritis, Kreatif, Nalar, Rasionalog, Induktif, Deduktif dan Ilmiah). Selanjutnya output non akademik, berupa keingintahuan yang tinggi, harga diri, kejujuran, kerjasama yang baik, toleransi, kedisiplinan, prestasi olahraga, kesenian dari para peserta didik dan sebagainya.

Mencermati karakteristik MPMBS di atas, menunjukkan bahwa MPMBS pada prinsipnya adalah bahwa sekolah mendapat otonomi luas dan bertanggung jawab dalam menggali, memanfaatkan, serta mengarahkan berbagai sumberdaya, baik internal maupun eksternal untuk kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Oleh karenanya MPMBS harus menjamin meningkatnya komunikasi antara pihak yang berkepentingan (stakeholders), komite sekolah, kepala sekolah, guru, siswa, orangtua dan seluruh warga masyarakat.

¹⁷Suryosubroto. *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), h.97

Metode

Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Alasan dipilihnya pendekatan fenomenologis, karena pendekatan ini melihat secara dekat interpretasi individual tentang pengalaman-pengalaman, sehingga data dikumpulkan dari latar yang alami (*natural setting*) sebagai sumber data langsung. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini ditempuh melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis dari Miles & Hubberman yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu pengumpulan data (*data collection*), reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan atau verifikasi (*conclutions*).

Pengecekan keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Menurut Moleong ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*).¹⁸ Derajat kepercayaan (*credibility*) dalam penelitian ini berupa tingkat kepercayaan data. Dalam hal ini, dilakukan dengan membuat wawancara dengan item pertanyaan yang sejenis kepada selain sumber utama. Keabsahan data dalam penelitian ini peneliti dapat mengecek menggunakan teknik observasi secara kontinu di lapangan dan triangulasi. Keteralihan (*transferability*) dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan kejadian empiris dalam pengelolaan arsip tentang kesamaan konteks, sehingga adanya kesamaan informasi data dari peneliti dan objek peneliti. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi keteralihan data, sehingga data tersebut adanya kesamaan empiris mengenai permasalahan yang diteliti. Kebergantungan (*dependability*) dalam penelitian ini dilakukan dengan pengamatan dan wawancara secara langsung dengan informan. Peneliti sangat bergantung pada subjek yang akan dijadikan data. Peneliti berkali-kali melakukan observasi dan wawancara pada sumber data. Kepastian (*confirmability*) dalam penelitian ini dilakukan dalam bentuk *confirmabilitas*, yaitu untuk menjamin kepastian data, dilakukan dengan pengecekan kembali hasil temuan sementara dengan data yang baru diperoleh yang terangkum dalam catatan observasi dan wawancara.

Hasil Penelitian

Pada prinsipnya pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola sudah terlaksana dan berjalan sesuai dengan keinginan dan harapan semua warga sekolah, namun tentunya dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program tersebut, karena pelaksanaannya melibatkan banyak unsur seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, siswa, sarana dan prasarana sekolah serta keterlibatan orang tua peserta didik, masyarakat, komite sekolah, dan lingkungan sekolah (*stakeholder pendidikan*). Unsur-unsur yang terlibat tersebut, di samping dapat menjadi faktor pendukung juga dapat menjadi faktor penghambat. Oleh karena itu, pada bagian ini peneliti mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola dari hasil wawancara dengan beberapa key informan yang dianggap paling tahu tentang permasalahan yang sedang diteliti dengan deskripsi sebagai berikut.

¹⁸ Lexi, J. Moleong. *Metodologi penelitian kualitatif*. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 324.

1. Faktor Pendukung

Faktor pendukung adalah faktor yang memberi daya dukung bagi terlaksananya pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola. Secara umum faktor-faktor yang mendukung pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola berdasarkan hasil temuan di lapangan berasal dari faktor internal dan eksternal yaitu sebagai berikut:

Adanya komitmen madrasah untuk melaksanakan kurikulum berdasarkan kebijakan yang berlaku, dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas lulusan yang didasarkan atas Ujian Nasional, peserta didik diberi tambahan pengayaan belajar mulai dari kelas X sampai kelas XII. Pengembangan diri diberikan dalam bentuk bimbingan Konseling, klub bidang studi, klub pengembangan keterampilan (PMR, Pramuka, dan lain-lain). Selain itu, adanya sumber daya yang cukup memadai, meskipun beragam namun secara formal sudah sesuai dengan standar minimal pendidikan dalam menjalankan tugas profesinya. Selanjutnya sekolah memiliki visi dan misi, tujuan, sasaran dan program yang sudah jelas, yang menjadi pedoman bagi warga sekolah di SMA Negeri 3 Atinggola untuk dapat bersama-sama mewujudkannya sehingga terciptanya output yang berkualitas.

Faktor pendukung pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola tergantung dari kepemimpinan kepala sekolah itu sendiri, dalam hal ini sebagai kepala sekolah aktif melakukan koordinasi dengan staf pada pelaksanaan kegiatan di sekolah. Wakil kepala sekolah menjalankan fungsi sebagai unsur yang membantu sekolah dalam rangka peningkatan dan penjaminan mutu sekolah. Guru melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai kalender pendidikan dan program yang telah ditetapkan. Wali kelas memberikan pembinaan kepada peserta didik, pada saat jam pelajaran maupun di luar jam pelajaran. Tenaga kebersihan setiap pagi selalu membersihkan sekolah, sehingga ketika kegiatan belajar dimulai, kondisi sekolah sudah terasa nyaman. Selain itu, sekolah ini memiliki lingkungan dan iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga mendukung proses pembelajaran berlangsung dengan nyaman. Oleh karena itu, sekolah terus berupaya pengupayaan faktor-faktor yang dapat menumbuhkan iklim tersebut diantaranya seluruh warga sekolah dari kepala sekolah, guru, pegawai, dan siswa hadir dan pulang pada waktunya, upacara bendera setiap hari senin, membuat pengumuman-pengumuman yang penting untuk diketahui oleh warga madrasah dan masyarakat, pembudayaan senam pagi/olahraga di madrasah diharapkan seluruh warga sekolah sehat jasmani dan rohani, sehingga pelaksanaan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab masing-masing dapat diselesaikan sebagaimana mestinya, serta memperhatikan kelengkapan administrasi penyelenggaraan kegiatan, sehingga kegiatan terserap dengan baik dan tidak menimbulkan persoalan-persoalan yang tidak diinginkan.

Lingkungan suatu sekolah sangat mempengaruhi kelancaran keberhasilan dalam suatu kegiatan proses pembelajaran di sekolah. situasi dan kondisi lingkungan sekolah cukup aman dan kondusif partisipasi masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan madrasah memberikan kenyamanan dalam kegiatan proses pembelajaran. Jika ditinjau dari letak geografisnya posisi sekolah sangat strategis sehingga mudah dijangkau dari berbagai arah sehingga dapat memenuhi kebutuhan

masyarakat akan pendidikan khususnya pendidikan menengah atas. Sebagaimana penjelasan dari wakil kepala sekolah bahwa salah satu hal yang sangat mendukung kegiatan pembelajaran di sekolah ini sehingga selama ini dapat berjalan dengan baik dan lancar adalah masalah situasi dan kondisi lingkungan sekolah yang aman dan tertib, karena adanya partisipasi warga masyarakat dalam menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan sangat mendukung. Apalagi letak madrasah yang cukup strategis, sehingga sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka.

Selanjutnya faktor keamanan dan ketertiban dalam suatu sekolah sangat mendukung kelancaran terlaksananya program pembelajaran di madrasah, sehingga pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola dapat berjalan dengan baik. Sebagaimana dikemukakan oleh kepala sekolah bahwa faktor pendukung yang tidak kalah penting adalah adanya kesadaran dari warga madrasah dalam mewujudkan suasana, iklim dan lingkungan sekolah yang kondusif, adanya komunikasi yang baik, terutama antar warga sekolah, dan juga sekolah dengan masyarakat sekitar, sehingga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing warga sekolah dapat diketahui, sekolah memiliki lingkungan atau iklim belajar yang aman, tertib, dan nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan nyaman.

Faktor pendukung lainnya adalah adanya peran orangtua di lingkungan keluarga sangat penting dalam membantu membina anaknya, mengontrol, mengawasi, dan memberikan motivasi agar senantiasa untuk belajar baik di rumah maupun di sekolah. Selain itu, peran dari komite sekolah sebagai wakil dan perpanjangan tangan dari orang tua dan masyarakat dalam membantu kelancaran proses pembelajaran di sekolah berupa bantuan tenaga pikiran dan dana, sehingga apa yang diharapkan oleh masyarakat terhadap sekolah dapat direalisasikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan terdapat 2 faktor pendukung pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya: 1) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat, 2) sekolah memiliki visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, 3) adanya lingkungan sekolah yang aman, tertib dan kondusif. Sementara faktor eksternal mendukung pelaksanaan program MPMBS adalah: 1) peran serta orangtua/wali siswa dalam mendukung pendidikan anaknya, 2) peran komite sekolah dalam memberikan dukungan kepada sekolah.

Faktor pendukung di atas, sejalan dengan pendapat Umaedi bahwa terdapat beberapa indikator yang menunjukkan karakter dari konsep MPMBS ini antara lain sebagai berikut: (1) lingkungan sekolah yang aman dan tertib; (2) sekolah memiliki misi dan target mutu yang ingin dicapai; (3) sekolah memiliki kepemimpinan yang kuat; (4) adanya harapan yang tinggi dari personil sekolah (kepala sekolah, guru dan staf lainnya termasuk siswa) untuk berprestasi; (5) adanya pengembangan staf sekolah yang terus menerus sesuai tuntutan IPTEK; (6) adanya pelaksanaan evaluasi yang terus menerus terhadap berbagai aspek akademik dan administratif; (7) adanya komunikasi dan dukungan intensif dari orang tua murid/masyarakat.¹⁹

2. Faktor Penghambat

¹⁹ Umaedi Parakasi, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*, (Malang: UMM Press, 2015), h.20

Terkait dengan faktor penghambat adalah faktor yang dapat menghambat atau bahkan dapat menggagalkan pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola, diantaranya dalam hal pendanaan yang masih sangat terbatas, ada beberapa fasilitas yang kurang, terdapat beberapa fasilitas gedung serta sarana dan prasarana lain belum dimiliki sekolah. Sebagian besar sarana dan prasarana tersedia namun masih sangat sederhana. Terdapat beberapa fasilitas gedung serta sarana dan prasarana lain belum dimiliki seperti ruang perpustakaan yang memadai dan lengkap, meskipun saat ini sudah ada namun belum memadai, serta belum terpenuhi secara lengkap buku bacaan di perpustakaan sesuai dengan kebutuhan guru dan siswa.

Faktor penghambat lainnya yaitu masih rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib sekolah seperti adanya beberapa guru yang masih menggunakan perasaan dalam menegakkan kedisiplinan, sehingga banyak peserta didik yang melanggar aturan ketika berhadapan dengan guru-guru tertentu yang sering mengabaikan pelanggaran yang mereka lakukan. Faktor penghambat lainnya yaitu berasal dari peserta didik. Sikap peserta didik yang masih labil, sehingga mereka menganggap melakukan pelanggaran adalah sesuatu yang membanggakan kalau tidak ketahuan. Hampir setiap hari masih ditemui beberapa siswa yang terlambat karena alasan yang cukup beragam misalnya karena bangun kesiangan, jarak rumah yang terlalu jauh dengan sekolah dan lain sebagainya yang secara realistis alasan yang disampaikan masih dapat diterima. Solusinya dilakukan dengan meningkatkan kesadaran warga sekolah dan menerapkan tata tertib sekolah secara adil tanpa pandang bulu. Selain itu, perlu menjalin kerjasama dengan orangtua/wali siswa untuk memantau perkembangan anaknya di rumah dan di sekolah.

Faktor penghambat yang tidak kalah penting menjadi perhatian dalam pelaksanaan program MPMBS, adalah sosialisasi kebijakan MPMBS intensitasnya masih kurang, temporer, dan dilakukan tidak secara menyeluruh atau total (komprehensif), sehingga belum dipahami konsep dan tujuan MPMBS tersebut secara baik warga sekolah dan pihak yang berkepentingan. Hal ini sesuai yang dikemukakan kepala sekolah bahwa sosialisasi program ini meskipun sudah lama belum dilakukan secara kontinyu dan menyeluruh (bersifat temporer) sehingga konsep dan tujuan kebijakan MPMBS belum dipahami oleh secara baik, bahkan yang tidak mengerti sama sekali apa itu MPMBS. Selain itu, dukungan masyarakat dalam bentuk pemberian pendapat, saran maupun kritik kepada sekolah dalam perencanaan program masih kurang, demikian halnya dalam memberi masukan kepada sekolah terkait peningkatan pembelajaran yang dibutuhkan sesuai dengan keinginan orangtua/wali siswa masih kurang, sehingga diharapkan orangtua/wali siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan program sekolah.

Mencermati berbagai faktor penghambat yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat tersebut antara lain: belum memadainya fasilitas pendukung pembelajaran, pendanaan yang minim, masih rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib madrasah, belum dipahami konsep dan tujuan MPMBS tersebut secara baik warga sekolah dan pihak yang berkepentingan serta peran orangtua/wali siswa terlibat dalam penyusunan perencanaan program sekolah belum maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, menunjukkan bahwa terlaksananya program MPMBS untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak terlepas dari faktor yang menghambat terlaksananya manajemen berbasis sekolah tersebut secara berkesinambungan, olehnya itu untuk menjaga agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah diperlukan kinerja para guru selalu memantau kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Demikian halnya yang berkaitan dengan faktor sarana dan prasarana yang dapat mendukung program MPMBS, sehingga peningkatan mutu pendidikan dapat berjalan sesuai dengan program yang berlaku dijalankan oleh kepala sekolah, pendidik dan peserta didik. Namun juga sarana dan prasarana bisa menjadi hambatan program MPMBS dalam meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu, diperlukan adanya koordinasi yang baik.

Faktor-faktor yang dikemukakan di atas, perlu menjadi bahan evaluasi untuk menghindari kegagalan dalam implementasi kebijakan program MPMBS di SMA Negeri 3 Atinggola. Kegagalan implementasi suatu kebijakan cenderung karena faktor ulah manusia, dimana pengambilan keputusan terkadang gagal memperhitungkan kenyataan adanya persoalan manusia (*human error*) yang sangat kompleks dan bervariasi, baik pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun sekolah beserta warganya sebagai pelaku kebijakan dan *target group*.

Merujuk kepada berbagai hambatan yang telah diidentifikasi dari hasil penelitian, dan dikaitkan dengan pandangan atau pendapat ahli mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan implementasi suatu kebijakan, maka peneliti berpendapat bahwa kegagalan implementasi suatu kebijakan, belum tentu sepenuhnya dikarenakan ketidakmampuan pelaksana (*aktor/stakeholders*), tetapi juga disebabkan karena pembentukan kebijakan. Disinilah dituntut kepiawaiian dari para pelaksana kebijakan (*aktor/ stakeholders*) supaya mampu melakukan penyesuaian-penyesuaian atau adaptasi, sehingga proses implementasi dapat berjalan efektif dan tujuan/pokok kebijakan dapat direalisasikan. Dalam hal ini sosialisasi implementasi kebijakan MPMBS harus terus dilakukan untuk memberikan pemahaman dan pencerahan kepada semua pihak untuk sama-sama merespon kebijakan tersebut.

Berkenaan juga dengan faktor penghambat implementasi kebijakan MPMBS, Wohlstetter dan Mohrmann dalam hasil penelitian mengungkapkan empat macam kegagalan implementasi, yaitu Pertama, sekedar mengadopsi model apa adanya atau tidak ada upaya kreatif. Kedua, Kepala Sekolah bekerja berdasarkan agenda kerja sendiri tanpa memperhatikan aspirasi warga sekolah. Ketiga, kekuasaan pengambilan keputusan terpusat pada satu pihak. Keempat, menganggap MPMBS adalah hal yang biasa dengan tanpa usaha yang serius akan berhasil dengan sendirinya, padahal pada kenyataannya implementasi MPMBS memakan waktu, tenaga, pikiran secara besar-besaran. Keempat indikator yang telah dipaparkan di atas, mengisyaratkan bahwa guna menghindari kegagalan implementasi kebijakan MPMBS tersebut, maka diperlukan keterlibatan atau partisipasi aktif semua pelaku kebijakan (*koalisi aktor/stakeholders*) untuk mengkaji, memahami dan melakukan penyesuaian atau adaptasi (*reformulasi*) yang dilandasi azas kerjasama, keterkaitan, kebersamaan dan akuntabilitas serta transparan.²⁰

²⁰ Hamzah, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah, (*Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, Vol. 10, No. 1, Juni 2013), h. 151-175.

Pelaksanaan kebijakan Program MPMBS perlu didukung oleh semangat demokrasi dan transparansi menuju suatu komitmen/ konsensus agar implementasi kebijakan MPMBS berjalan dengan baik, dan tujuan kebijakan (meningkatkan mutu pendidikan) tercapai. Koalisi aktor/stakeholders yakni kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, siswa, orang tua siswa, masyarakat, Komite Sekolah/ pejabat pemerintah terkait, peduli terhadap kegiatan pendidikan di sekolah. Oleh karena itu, dari sisi ari sisi kekuasaan, kepala Sekolah mempunyai kewenangan dalam melaksanakan program MPMBS. Dalam praktiknya, kepala sekolah dituntut untuk menerapkan kepemimpinan terbuka dan partisipatif. Kepala sekolah tidak dapat menggunakan otoritas/ kewenangannya secara mutlak tanpa memperhatikan masukan dan aspirasi dari bawahan atau staf. Dari sisi kepentingan, kepala sekolah mempunyai keinginan dan harapan yang tinggi terhadap peningkatan mutu prestasi siswa dengan melaksanakan program MPMBS. Sedangkan strategi yang dilakukan kepala sekolah untuk keberhasilan pelaksanaan program MPMBS adalah dengan menerapkan kepemimpinan demokratis dan manajemen partisipatif dengan segenap warga sekolah. Dari sisi kekuasaan, guru mempunyai kekuasaan di dalam menentukan materi ajar yang akan diberikan kepada siswa dan mempunyai kekuasaan di dalam proses penilaian setelah proses pembelajaran berlangsung. Dilihat dari sisi kepentingan, guru mempunyai kemauan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan mutu prestasi siswa baik yang bersifat akademik maupun nonakademik. Sedangkan strategi yang dilakukan guru antara lain dengan memberikan tambahan jam pelajaran maupun memberikan pelajaran ekstrakurikuler (Olahraga, Kesenian, Pramuka, PMR, dan sebagainya). Hal ini diharapkan dapat membawa dampak positif terhadap peningkatan efisiensi dan efektivitas kinerja sekolah, dengan menyediakan layanan pendidikan komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat sekolah setempat.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program MPMBS, kepala madrasah sebagai seorang pemimpin membutuhkan suatu keahlian dan kecapan dalam pengelolaan fungsi manajemen agar mencapai tujuan tujuan dan sasaran sekolah, begitu juga dalam memimpin sekolah. Keterbukaan seorang kepala sekolah merupakan hal yang penting dan utama. Hal ini dicontohkan manajemen pada zaman Nabi Yusuf. Beliau merupakan seorang manajer yang sangat handal, selain sebagai seorang Nabi beliau memiliki dua sifat yang patut dicontohi oleh seorang manajer, hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an surah Yusuf : 55

عَلِيمٌ حَفِيظٌ إِنِّي الْأَرْضِ حَزَائِنٍ عَلَىٰ أَجَعَلَنِي قَالَ

Terjemahnya:

Berkata Yusuf: "Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan."²¹

Tugas pokok kepala sekolah dalam rangka pembinaan program pengajaran, SDM, kesiswaan, dana, sarana dan fasilitas, serta hubungan kerja sama sekolah dengan masyarakat antara lain: melibatkan warga sekolah dalam pengambilan keputusan

²¹Departemen Agama RI. *al-Quran dan Terjemahnya*. (Semarang: CV Asy-Syifa, 1996), h.14

melalui rapat dewan guru. Hal ini mutlak dilakukan sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an:

لَا وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ الَّذِينَ يَسْتَوِي هَلْ قُلُّ رَبِّهِ رَحْمَةً وَيَرْجُوا الْآخِرَةَ حَذَرُوا قَائِمًا سَاجِدًا أَلَيْلَاءَ أَنَا قَبِيتُ هُوَ أَمَّنْ
 ﴿٩﴾ الْآلْبَابِ أُولُو أَيْدِي كَرِيمًا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung) ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran (QS. Az-Zumar : 9).²²

Selanjutnya dalam kegiatan proses pembelajaran di kelas, usaha-usaha yang dilakukan oleh guru atau wali kelas untuk mengatasi kendala selalu berusaha dengan penuh tanggung jawab, serta melakukan koordinasi dengan pihak lain, atau lebih dulu melakukan musyawarah dengan cara mencari solusi yang dapat meningkatkan mutu pendidikan yang baik. Serta adanya motivasi para peserta didik untuk belajar dengan tekun. Juga adanya dorongan dari pihak guru untuk memberikan semangat kepada siswanya untuk mengatasi semua masalah yang dihadapi, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Masih rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib madrasah, merupakan salah satu faktor yang dapat menghambat tingkat pendidikan yang bermutu di sekolah ini, maka peraturan yang diterapkan adalah salah satu upaya untuk dapat mengatasi semua permasalahan, dengan demikian peningkatan mutu pendidikan berjalan sesuai dengan tujuan pendidikan di sekolah. Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 58 yaitu:

﴿٥٨﴾ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.²³

Solusi lainnya adalah perlu adanya peningkatan kerjasama dengan komite sekolah melalui partisipasi masyarakat dan orangtua/wali siswa. Untuk mengusahakan dalam mengatasi segala hambatan yang dihadapi dengan berupaya melakukan suatu penyelesaian dengan musyawarah bersama unsur-unsur yang terkait dan terlibat dalam kegiatan proses pembelajaran baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui peran serta dan partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik dalam membantu penyelenggaraan pendidikan, sehingga pelaksanaan program MPMBBS dapat

²²Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya.*, h. 460

²³Departemen Agama RI. *Al-Qur'an da TerjemahNya.*, h. 113

berjalan dengan baik dan dapat dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Peranan dan tanggung jawab kepala madrasah dalam mengatasi hambatan diperlukan kesabaran dan ketekunan untuk melakukan suatu perubahan, dengan tujuan untuk mengatasi hambatan yang dihadapi oleh sekolah, sehingga memerlukan tenaga-tenaga yang terampil utamanya yang mau menerima masukan dari kepala sekolah, selain itu menjalin kerja sama dengan masyarakat dalam hal ini komite sekolah dengan jalan musyawarah untuk mencari solusi atau jalan keluar setiap masalah dan hambatan yang dihadapi, sehingga pelaksanaan pendidikan di sekolah berjalan sesuai harapan pemerintah dan masyarakat.

Mencermati uraian di atas menunjukkan bahwa usaha dan upaya di atas perlu dilakukan oleh pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah beserta personil pendukungnya, untuk senantiasa memberdayakan segala sumber daya yang dimiliki dalam rangka peningkatan pelaksanaan program MPMBS di SMA Negeri 3 Gorontalo terlaksana sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari program tersebut. Kepala sekolah harus tampil sebagai koordinator dari sejumlah orang yang mewakili berbagai kelompok yang berbeda dalam masyarakat untuk memberikan masukan dan saran-saran perbaikan. Sementara sekolah secara profesional harus terlibat dalam setiap proses perubahan melalui penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan di dalam sekolah itu sendiri maupun sekolah lain. Jadi sumber daya yang ada, harus menggunakannya secara lebih efisien sumber daya tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat bagi peningkatan mutu pendidikan. Akhir dari semua itu ditujukan kepada keberhasilan sekolah untuk menyiapkan pendidikan yang berkualitas/bermutu bagi masyarakat dan dapat memenuhi harapan mereka sebagai pengguna layanan pendidikan.

Simpulan

Faktor pendukung pelaksanaan program Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah di SMA Negeri 3 Atinggola yaitu: memiliki kepemimpinan yang kuat, memiliki visi dan misi serta tujuan dan sasaran yang jelas, adanya lingkungan sekolah yang aman, tertib dan kondusif, peran serta orangtua/wali siswa dalam mendukung pendidikan anaknya dan adanya peran komite sekolah dalam memberikan dukungan kepada sekolah. Sementara faktor penghambatnya antara lain: sarana dan prasarana yang belum lengkap, pendanaan yang minim, masih rendahnya budaya disiplin dan penegakan tata tertib madrasah, belum dipahami konsep dan tujuan MPMBS tersebut secara baik warga sekolah dan pihak yang berkepentingan serta peran masyarakat dalam membantu program sekolah belum maksimal. Usaha untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu pendidikan melalui pelaksanaan program MPMBS, sekolah harus memperhatikan apa yang menjadi pandangan masyarakat tentang mutu pendidikan, maka dengan dilaksanakan program ini, masyarakat dapat merasakan ada perubahan peningkatan mutu pendidikan, mulai dari proses belajar mengajar, kemampuan dalam mengembangkan program, meningkatkan disiplin, meningkatkan kinerja, sampai supervisi dan monitoring secara terus menerus.

Referensi

Bahtiar, I. Y. (2011). *Kebijakan Pembaruan Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.

- Departemen Agama RI. (1996). *al-Quran dan Terjemahnya*. Semarang: CV Asy-Syifa.
- Duhou, I.A. (2012). *School-Based Management*. Jakarta: Logos.
- Hadi, M.Y. (2014). *Menyemai Benih Teknologi Pendidikan*. Jakarta: Kencana.
- Hamzah. (2013). Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 10(1), 151-175.
- Ibrahim, B. (2013). *Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Karna, H. (2015). *Manajemen Perubahan Sekolah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Moleong, J. L. (2012). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nur, A. (2010). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah; Buku 1 Konsep Dasar*. (Jakarta: Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik Dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional.
- Nurkolis. (2010). *Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi*. Jakarta : Grasindo.
- Parakasi, U. (2015). *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah*. Malang: UMM Press.
- Rohiat. (2009). *Manajemen Sekolah Teori Dasar Dan Praktik*. Bandung: Refika Aditama.
- Rosyada, D. (2012). *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana.
- Siahaan, A., dkk. (2006). *Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah*. Jakarta: Quantum Teaching.
- Slamet, PH. (2016). *Manajemen Berbasis Sekolah: Partisipasi, Transparansi, Akuntabilitas, dan Income Generating Activity*. Jakarta: Buletin Pelangi Pendidikan
- Sola, E. (2017). Penguatan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS) Melalui Implementasi Kurikulum 2013. *Jurnal Idaarah*, 1(1), 1-13.
- Sudarmawan, D. (2012). *Konsep dan Teori Manajemen Berbasis Sekolah*. Jakarta: Direktorat Pembinaan Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi.
- Suryosubroto. (2014). *Manajemen Pendidikan di Sekolah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Umiarso., & Imam, G. (2010). *Manajemen Mutu Sekolah di Era Otonomi Pendidikan*. Jogjakarta: IRCiSoD.
- Zakaria, D., & Ibrahim, S. (2019). Efektivitas Bimbingan Belajar Mandiri dan Implikasinya terhadap Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam Peserta Didik di SMK Negeri 3 Gorontalo. *Jurnal Ilmiah AL-Jauhari: Jurnal Studi Islam Dan Interdisipliner*, 3(2), 1-18.
-